

ISBN 978-602-70262-1-6

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PEMANTAPAN KURIKULUM FIS

BERBASIS KKNI UNTUK PERSIAPAN

GENERASI EMAS 2045



Editor:

Prof. Dr. Ferdinand Kerebunu, M.Si.

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si

Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si

Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd.



**KERJASAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA DENGAN
FORUM PIMPINAN FIS (PENDIDIKAN) SE-INDONESIA**

2015

10/10.

PROSIDING

**“PEMANTAPAN KURIKULUM FIS BERBASIS KKNI
UNTUK PERSIAPAN GENERASI EMAS 2045.”**

**KERJASAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA
DENGAN FORUM PIMPINAN FIS (PENDIDIKAN)
SE INDONESIA**



Editor:

Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si.

Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si.

Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

2015

“PEMANTAPAN KURIKULUM FIS BERBASIS KKN UNTUK PERSIAPAN GENERASI EMAS 2045.”

© Penulis

Penyunting: Ferdinand Kerebungu

Reviewer:

Sisca B. Kairupan

Apeles Lexi Lonto

Theodorus Pangalila

Foto Sampul:

Theodorus Pangalila

Perancang Sampul:

Erick Lobja

Penata Letak:

Paulus Robert Tuerah

Diterbitkan atas kerjasama:

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado dan

Forum Pimpinan FIS (Pendidikan) Se Indonesia

ISBN 978-602-70262-1-6

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya sehingga penyusunan prosiding seminar nasional kerja sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado dan Forum Pimpinan FIS (Pendidikan) Se-Indonesia dengan tema: **“PEMANTAPAN KURIKULUM FIS BERBASIS KKNi UNTUK PERSIAPAN GENERASI EMAS 2045.”** dapat diselesaikan dengan baik. Seminar Nasional ini diselenggarakan dalam rangkaian Forum Pimpinan FIS (Pendidikan) se-Indonesia pada tanggal 1-3 Oktober 2015.

Dalam prosiding ini, tertuang tulisan-tulisan para dosen dari berbagai latar belakang Ilmu Sosial. Di dalamnya tertuang berbagai ide tentang pendidikan KKNi, Kurikulum FIS dan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang paling dalam kepada para penulis/kontributor yang telah memberikan sumbangsih pikiran yang dituangkan dalam artikel, sehingga memungkinkan prosiding ini dapat dirampungkan dengan baik. Diucapkan terima kasih pula kepada jajaran Panitia Seminar dan Forum Pimpinan FIS, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan sumbangan pemikirannya.

Besar harapan kami, kiranya prosiding ini, terutama tulisan-tulisannya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kreatif dan kritis ke depan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial, terutama bagi pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Kami sangat menantikan sumbangan saran atau kritik yang membangun bagi penyempurnaan prosiding ini, akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala saran dan masukan yang diberikan.

Selamat membaca

Manado, 01 Oktober 2015

Editor,

Prof. Dr. Ferdinand Kerebunu, M.Si.

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si.

Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si.

Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd.

KATA PENGANTAR DEKAN FIS UNIMA

Memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun kemerdekaan sebagai bangsa: tantangan ke masa depan semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang menyeluruh, terpadu dan sistematis serta tepat sasaran.

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks tersebut adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan handal untuk menghadapi percaturan pergaulan umat manusia secara global di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu visi penting bagi Indonesia menyongsong seratus tahun kemerdekaan adalah penyiapan generasi emas tahun 2045.

Fakultas Ilmu Sosial di bawah naungan LPTK di Indonesia mengemban tugas penting dalam rangka persiapan SDM yang terampil dan mampu menjawab tantangan jam menjelang era satu abad Indonesia .

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam rangka melaksanakan tugas kependidikan sebagai bagian integral dari usaha memaslahatkan manusia Indonesia yaitu bagaimana FIS dapat mengembangkan kurikulum yang berbasis KKNI sebagai landasan berpijak dalam rangka menjawab tantangan menyiapkan generasi emas dimaksud.

Melalui Forum Silaturahmi LPTK Negeri FIS Se- Indonesia dan Seminar Nasional tahun 2015 dengan FIS Unima di Tondano sebagai tuan rumah; maka diharapkan: 1. Mampu memetakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pemantapan kurikulum FIS berbasis KKNI sebagai landasan pengembangan SDM generasi emas 2045; 2. Mampu mendeskripsikan jati diri FIS sebagai LPTK dalam menyiapkan generasi emas 2045 melalui pemikiran yang konstruktif; 3. Mampu mengembangkan jurnal sebagai wadah publikasi hasil penelitian dan artikel dosen FIS maupun serumpun di seluruh wilayah Indonesia.

Manado, 01 Oktober 2015

Dekan FIS UNIMA

Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si.

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Kata Pengantar Dekan FIS UNIMA	iv
 ARAH DAN KEBIJAKAN KURIKULUM DALAM MEMPERKUAT JATI DIRI FIS SEBAGAI LPTK UNTUK MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS TAHUN 2045 Prof. Dr. Warsono, MS.....	 1
 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM FIS/FPIPS BERBASIS KKNi UNTUK MEMPERKUAT JATI DIRI SEBAGAI LPTK Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd	 11
 PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PPKN FIS UNIMA BERBASIS PADA KKNi DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045 Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si	 23
 PENGEMBANGAN INSTRUMENT PENILAIAN SKRIPSI BERBASIS LEVEL KKNi Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd	 31
 MEMPERSIAPKAN CALON GURU SEJARAH MELALUI OPTIMALISASI PEMBELAJARAN YANG BERORIENTASI PEMAHAMAN MAKNA Arif Purnomo, S.Pd., M.Pd.	 37
 PERGESERAN DARI PELAJARAN SEJARAH (IPS) KE LITERASI TEKS SEJARAH: Mewujudkan Pembelajaran Sejarah Bermakna Dr. Agus Suprijono, M.Si	 43
 KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU POLITIK UNNES BERBASIS KKNi DALAM MENCAPAI TARGET MUTU LULUSAN YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF Martien Herna Susanti	 51
 PENGEMBANGAN BERPIKIR KRITIS MELALUI PENGUATAN PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS KKNi DALAM RANGKA MENGHASILKAN LULUSAN BERDAYA SAING GLOBAL Sarnini	 61
 IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI SMA SE KOTA SEMARANG Saptono Putro, Hariyanto dan Kholimat Bakal Adityas	 72
 ANALISIS KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG Suryanef dan Al Rafni	 77

RELEVANSI KURIKULUM PRODI IAN FIS UNP TERHADAP KEBUTUHAN LULUSAN DALAM PEKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KURIKULUM BERBASIS KKNi Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	83
DESENTRALISASI PENDIDIKAN: POLITIK DAN KONSENSUS? Dra. Meiske M. W. Lasut, M.Hum.	95
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI DI LPTK SELURUH INDONESIA Nofrion & Yurni Suasti	102
PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR-DASAR KOMUNIKASI CALON GURU MELALUI KONSEP TEACHER'S IMMEDIACY Puspita Sari Sukardani, S.T., M.Med.Kom. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom	110
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERKOTAAN PADA SEKTOR PENDIDIKAN PASKA TARIK-ULUR PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 Prof. Dr. Dasman Lanin, M.Pd.....	117
PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS: Kajian Historis terhadap Desentralisasi Pendidikan Di Amerika Serikat dan Implikasinya bagi Indonesia Dr. Ruth S. Umbase, M.Hum.	133
STUDI TENTANG PENGEMBANGAN TEKNIK PEMBELAJARAN INOVATIF MATA PELAJARAN SEJARAH PADA SMP / SMA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Dr. Meike Imbar, M.Pd.	149
PENGEMBANGAN KURIKULUM PKn BERBASIS KKNi MELALUI OPTIMALISASI PENERAPAN VARIASI MENGAJAR Dr. Julien Biringan, M.Si	169
PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 OLEH GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI SMA SE-KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 Apik Budi Santoso & Rahayu Budi Arthani	175
MEDIA SEJARAH BERBASIS KKNi SEBAGAI SARANA PEMAHAMAN BELAJAR SEJARAH BANGSA Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	181
KKNi UPAYA MEMBANGUN PROFESIONALISME GURU MASA DEPAN Sri Mastuti P	194
PERAN STRATEGIS <i>HUMAN RESOURCES DEPARTMENT</i> DALAM PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI Dr. Arie Supriati, M.Si.	200
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA N 1 TONDANO Dr. Maryam Lamaridisi	204

ANALISIS PERAN NILAI BUDAYA SENSITIF DALAM MEMPERKUAT PERAN GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN DI SULAWESI UTARA Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si.	209
PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KKNI PRODI DI LINGKUNGAN FIS LPTK NEGERI DI INDONESIA Drs. Emizal Amri, M.Pd.,M.Si.	214
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI SEKOLAH Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd.	222
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN SEKOLAH Dr. Yoseph D.A. Santie, MS.	233
TINGKAT KESESUAIAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN MENUJU SISTEM PERKULIAHAN BERKUALITAS BERBASIS SMM ISO 9001:2008 Erni Suharini, Dewi Liesnoor S, Subagyo, Rini Iswari.	239
PENTINGNYA ROAD MAP PENELITIAN DALAM MENUNJANG KKNI DI PRODI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Martinus Legowo.	246
MENGEMBANGKAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS 2045: PERSPEKTIF PENDIDIKAN HUMANIS RELEGIOUS Cholisin.	260
PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DENGAN PEMAMTAPAN KURIKULUM BERBASIS KKNI Dian Arlupi Utami, S.Sos, M.AP.	272
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (<i>INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK</i>) Prasetyo Isbandono.	281
MENYIAPKAN LULUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI YANG MEMILIKI KESADARAN RUANG MELALUI KKNI Dr. Muhammad Zid M.Si.	287
MENDESAKNYA KURIKULUM BERBASIS KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN TINGGI Refti Handini L.	293
TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN GEOGRAFI DALAM MENYONGSONG KEHIDUPAN DI ABAD XXI Agus Sutedjo.	301
PELESTARIAN SITUS SEJARAH BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN ILMU	

DAN KEPARIWISATAAN DI MINAHASA SELATAN L. H. Onibala.....	308
ETIKA PROFESI SEBAGAI KONTROL KUALITAS GURU Pudji Astuti	321
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN HYBRIDLEARNING MATA KULIAH PENGANTAR SOSIOLOGI DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Dra.Trisni Andayani, M.Si	329
PROFESIONALISME GURU Dr. Hetreda Terry, M.Hum	337
KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN GURU MENGAJAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PROSES PEMBELAJARAN GEOGRAFI Jovelien N. Laloan	344
EVALUASI POTENSI OBJEK WISATA TAMAN BUNAKEN DAN PENGEMBANGANNYA Dr. Gystin Dj. Sumilat, STh, Msi.	250
PENGUATAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN <i>SERVICE LEARNING</i> UNTUK MENINGKATKAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN SISWA PADA MATERI POKOK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ria Vani Paulita dan Asnidar	370
TINGKAT PENGETAHUAN GURU GEOGRAFI TENTANG KURIKULUM 2013 DI SMA SE-KOTA BINJAI PROPINSI SUMATERA UTARA Wardah Maulida dan Nurmala Berutu	382

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (*INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK*)

Prasetyo Isbandono

Pendahuluan

Era globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa pada setiap sendi kehidupan manusia di dunia. Globalisasi seolah-olah telah merobohkan tembok pembatas antara bangsa dan negara yang menghadirkan suatu persaingan yang terbuka dan kompetitif. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari efek globalisasi ini termasuk Indonesia. Salah satu efek yang sangat dirasakan Indonesia saat ini adalah tantangan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh banyak sektor

termasuk sektor tenaga kerja atau sumber daya manusia pada umumnya. Efek lanjut dari globalisasi yang menuntut persaingan tenaga kerja secara terbuka adalah munculnya pengangguran yang disinyalir timbul karena rendahnya kualitas tenaga kerja. Jumlah pengangguran ini disinyalir dapat disebabkan oleh tidak sesuainya capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh tenaga kerja dari institusi pendidikan (misalnya perguruan tinggi) dengan tuntutan kualifikasi (kebutuhan) lapangan kerja.

Kita tidak dapat menghindari dari arus globalisasi. Terlebih lagi Indonesia sudah meratifikasi GATS (General Agreement on Trade in Services) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) maka globalisasi dan perdagangan bebas antar negara tidak bisa dielakkan lagi. Karena itulah diperlukan pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia melalui upaya peningkatan pengakuan dan penyetaraan kualifikasi baik di dalam dan di luar negeri. Melalui pengakuan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia, kompetensi individu akan diketahui dan dapat disandingkan pada ranah pekerjaan atau bidang tugasnya. Pengakuan itu dilakukan melalui pedoman yang disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

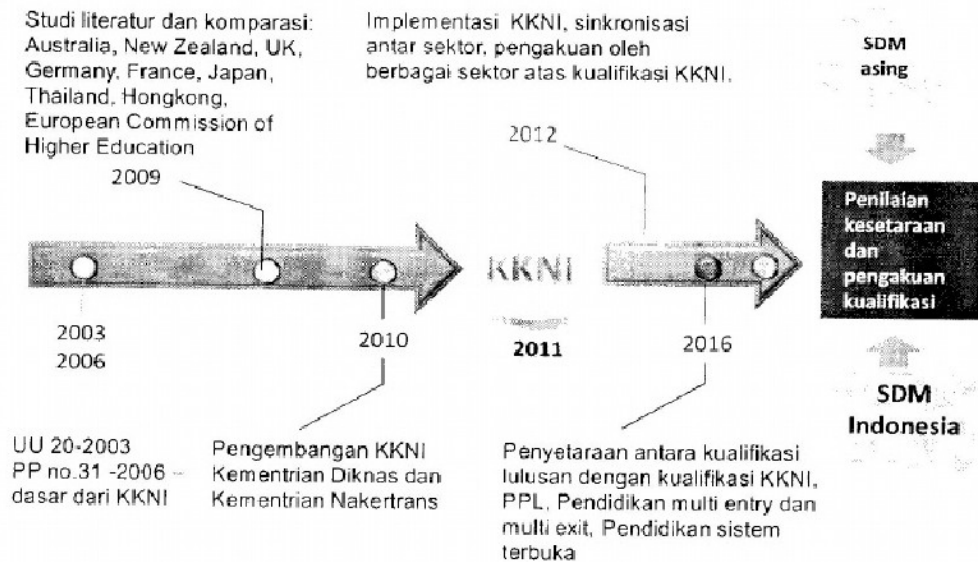
Isi

Sebagai salah satu institusi, sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan kualitas tenaga kerja maka Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Tinggi dengan didukung oleh gagasan dari Direktorat Bina Instuktur dan Tenaga Kepelatihan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi telah berhasil menyusun suatu kerangka kualifikasi nasional yang disebut *Indonesian Qualification Framework (IQF)* atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Dirjen Dikti, 2010: 7). KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah Kemendiknas, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Dirjen Dikti, 2010 : 17).

KKNI dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 serta merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). Pada tahun 2006 dilakukan studi literature serta melakukan komparasi berkaitan dengan materi serta kurikulum dari berbagai Negara, antara lain: Australia Inggris, Jerman, Prancis, New Zealand, Jepang, Thailand, Hongkong, serta Komisi Eropa pendidikan tinggi yang dikenal dengan *European Qualification Framework (EQF)*. Pada tahun 2010 mulai dilakukannya pengembangan KKNI yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pada 2011 awal mula implementasi KKNI dilakukan melalui sinkronisasi antar sector serta mencari

pengakuan antar sector dari berbagai kualifikasi atas KKNI. Pada 2016 dilakukannya penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan KKNI. Penyetaraan dan kualifikasi ini dimaksudkan untuk mengkomparasikan antara SDM asing dan SDM Indonesia.

Tatakalanya Pengembangan KKNI



Sumber: Dirjen Dikti 2011

European Qualification Framework (EQF) sebagai salah satu kerangka kualifikasi yang dirujuk dalam pengembangan KKNI, EQF mengepadankan jenjang kualifikasi dengan jenjang pendidikan atau pelatihan, bahkan dengan gelar yang disandanginya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat nampak kuat mendasari pengembangan EQF. EQF harus diakui memberikan pengaruh sangat kuat pada pengembangan dan penyusunan KKNI khususnya dalam mendefinisikan kemampuan yang dimiliki seseorang pada setiap jenjang kualifikasi. EQF memiliki 8 jenjang/ tingkatan tertinggi lulusan pendidikan doktor dengan kemampuan mengkreasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau profesi baru dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi berkehidupan yang lebih baik. EQF menyepadankan jenjang kualifikasi dengan jenjang pendidikan atau pelatihan, bahkan dengan gelar yang disandanginya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat nampak kuat mendasari pengembangan EQF.

Kerangka kualifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan kecocokan antara sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, kerangka kerja kualifikasi dipandang sebagai mesin inovasi yaitu titik yang memperkenalkan mereka untuk mempromosikan sejumlah fundamental dari reformasi jangka panjang. Kerangka kualifikasi nasional merupakan deskripsi tegas di tingkat nasional dari sistem pendidikan, yang secara internasional dipahami yang menggambarkan semua kualifikasi dan prestasi belajar yang dibuktikan (berdasarkan sertifikat) dalam pendidikan tinggi dan berhubungan satu sama lain dalam cara yang koheren dan yang mendefinisikan hubungan antara kualifikasi pendidikan tinggi. Ini berarti bahwa kerangka kualifikasi nasional sebagai berikut.

1. Menggambarkan semua kualifikasi (derajat atau diploma) yang diberikan dalam sistem pendidikan tinggi dan berhubungan kualifikasi satu sama lain dengan cara yang koheren.
2. Mendefinisikan hubungan antara kualifikasi pendidikan yang berbeda.
3. Menjelaskan tingkat kualifikasi tertentu dalam konteks nasional.
4. Dipahami secara internasional.

Sandra Bohlinger menyatakan bahwa Kerangka kualifikasi ini sebagai mesin inovasi sebagaimana pernyataan berikut ini.

"Countries that introduce a qualifications framework are thereby seeking to make their national educational systems more transparent, more innovative and more competitive. They also aim to improve the match between the educational system and the labour market. Thus, qualifications frameworks are seen as engines of innovation : the point of introducing them is to promote a number of fundamental, long-term reforms" (Bohlinger, 2008:1).

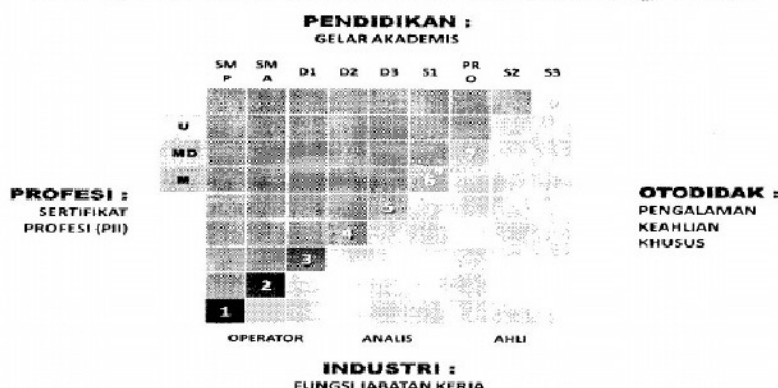
Afzaal Hussain mengungkapkan bahwa inti dari pencapaian tujuan kurikulum tergantung pada proses evaluasi selama pengembangan kurikulum tersebut. Hal ini disebabkan sering tidak ada evaluasi dari kurikulum yang diimplementasikan; maka tidak ada umpan balik yang diterima untuk merevisi kurikulum (Afzaal dkk., 2011:263). Program pengembangan kurikulum pendidikan tinggi hendaknya dapat menampung dan melayani semua sistem nilai yang ada untuk mencapai tujuan yang dapat diterima oleh semua pihak sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing harus benar-benar mendapat perhatian, karena otoritas dan tanggung jawab yang berbeda-beda tersebut jangan sampai mengacaukan usaha pengembangan kurikulum (Trisharsiwi, 2008:380). Lebih jauh, Moses L. Singgih & Rahmayanti menyatakan bahwa kurikulum program studi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan (Moses L. Singgih & Rahmayanti, 2008:133).

Adanya KKNi diharapkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat menyesuaikan diri sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki *learning outcomes* yang sesuai dengan yang dibutuhkan *stake-holder* atau pengguna lulusan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tidak bertentangan dengan keberadaan PP No. 66 Tahun 2010 tentang otonomi perguruan tinggi, sehingga penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tersebut.

KKNi disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNi juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain.

Pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi secara skematik dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar dibawah terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual (Dirjen Dikti, 2010:17). KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

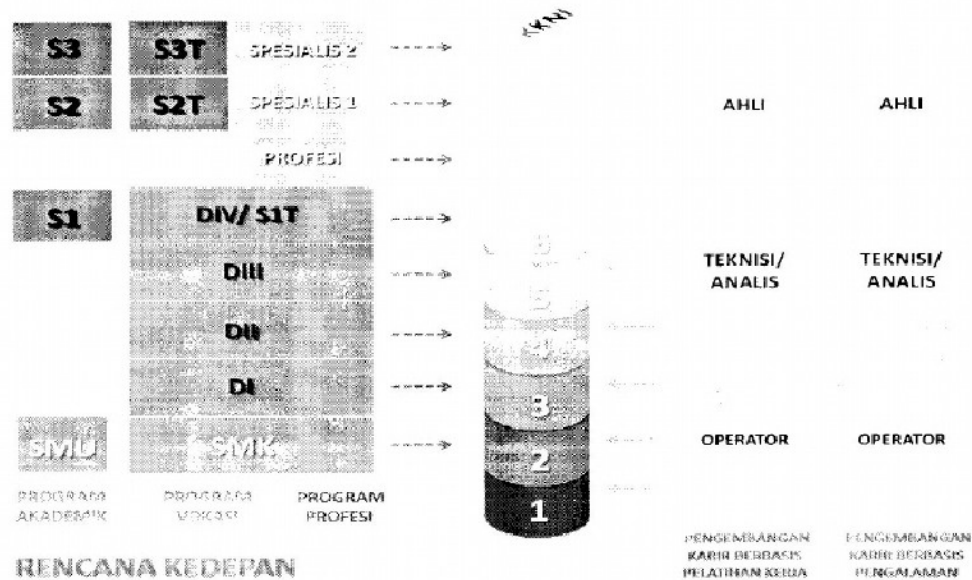
Pencapaian Level pada KKNi Melalui Berbagai Jalur



Sumber: Dirjen Dikti 2011

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang 1-3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4-6 dalam jabatan teknisi atau analis, serta jenjang 7-9 jabatan ahli.

Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; dan seterusnya hingga jenjang 9 doktor dan doktor terapan.



Sumber : Dirjen Dikti 2010

Di dalam pengembangan, KKNi diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah KEMDIKNAS, pengalaman kerja atau jenjang karir ditempat kerja. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (pathways) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual. Dengan pendekatan tersebut maka KKNi dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat luas untuk perencanaan karir individual. Sektor pendidikan formal, misalnya dapat menggunakan KKNi sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNi dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Hal ini juga dapat bermanfaat di dalam merencanakan pengembangan relevansi pendidikan tinggi yang lebih komprehensif. KKNi juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi untuk melakukan penyesuaian dan penilaian kesetaraan di tingkat nasional tentang kriteria kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, industri, dan lain-lain juga membutuhkan KKNi sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan sumberdaya manusia masing-masing secara lebih komprehensif baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru.

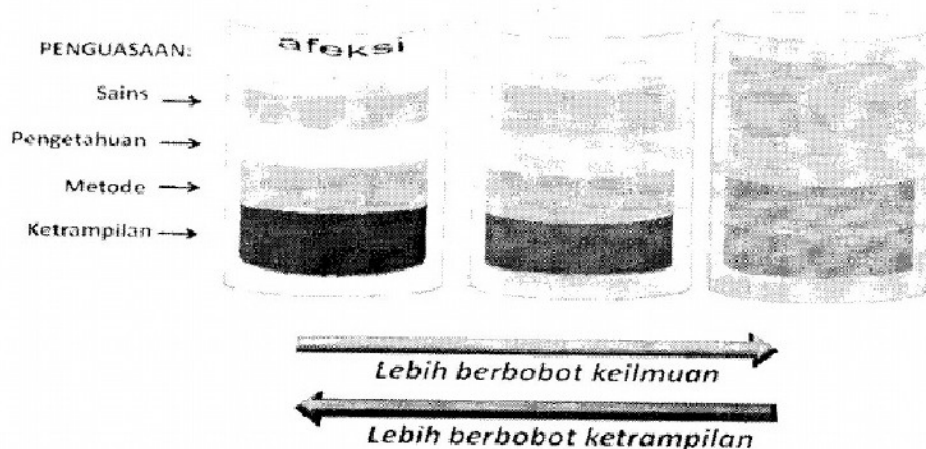
Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan

manajerial. Ke-empat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNi.

Dengan demikian ke-9 jenjang KKNi merupakan penjabaran yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNi adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut.
2. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNi ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
3. Metoda dan tingkat kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (*intellectual skills*).
4. Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut. (Dirjen Dikti 2010 : 18)

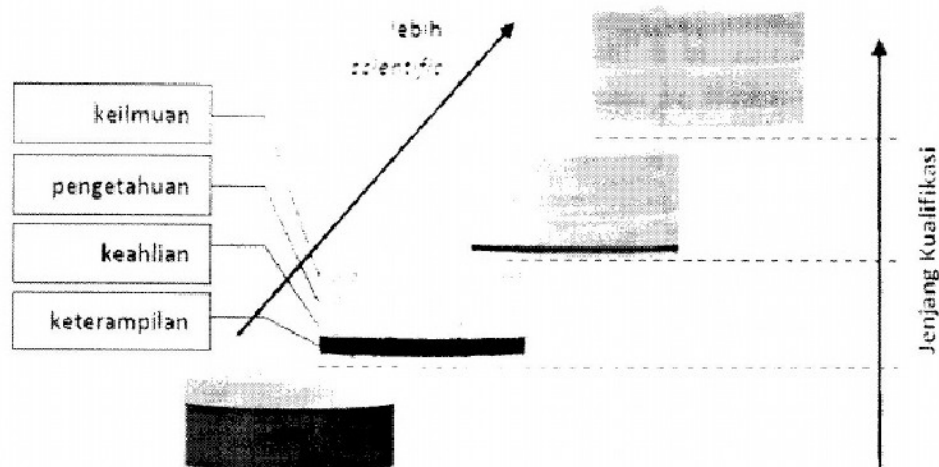
Karakteristik Unsur KKNi



Keempat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNi. Internalisasi dan akumulasi keempat parameter yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur atau melalui pengalaman kerja disebut capaian pembelajaran. Gambar dibawah menunjukkan bahwa dalam setiap deskriptor KKNi untuk jenjang kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur-unsur keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*know-how*) dan keterampilan (*skill*) yang bervariasi satu dengan yang lain.

U,
hasil
S UPI

Jampu Mata
Jgi Pedesaan



Penutup

KKNI dapat diimplementasikan di semua bidang keahlian. Tapi tentu saja secara bertahap karena harus merumuskan deskripsi level kualifikasi untuk semua bidang keahlian.

Konsekuensi dari penerapan KKNI adalah dunia pendidikan akademis mau tidak mau harus melakukan penyesuaian terhadap "dunia lain" (industri, otodidak, persatuan profesi) sedemikian sehingga ketika lulusan pendidikan akademis (formal) dipertemukan dengan orang-orang dari industri dengan level KKNI sama, kemampuan mereka juga harus sama.

Konsekuensi lain dari KKNI ini adalah berubahnya system pendidikan nasional terutama dalam menetapkan kurikulum yang disesuaikan dengan kualifikasi capaian pembelajaran yang harus merujuk pada kualifikasi yang ada dalam KKNI. Dengan adanya perubahan tersebut akan berdampak pada model pembelajaran dalam system pendidikan, baik pendidikan formal, non formal dan informal.

Daftar pustaka

- Bohlinger, Sandra. (2007). Competences as the core element of the European qualifications framework. *European journal of vocational training*, 42/43, 96-112.
- Dirjend Dikti. (2010). *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* (Edisi 1). Jakarta: Dikti. (2012). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 8, Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- European Qualifications Framework. *European journal of vocational training*, 42, 33-57.
- Martin, Gary. (2001). Competency framework for teachers. (Terjemahan Vitriyani Pryadarsina, Budyanto Lestyana, Yuliana Kristiyani dan Theresia Kristianty). *Jurnal Pendidikan Penabur*, 1, 139-148. Moses L.
- Singgih & Rahmayanti. (November 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan pada perguruan tinggi. *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 'Perubahan kurikulum perguruan tinggi dalam menghadapi liberalisasi akademik*, 3, 371-380.

